



MULAI 10 NOVEMBER UNTUK KOTA DAN SLEMAN

Suplai Minyak Tanah Bersubsidi Dihentikan

YOGYA (KR) - Distribusi minyak tanah bersubsidi ke wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman akan dihentikan mulai 10 November mendatang. Selanjutnya, Pertamina menyalurkan minyak tanah dengan harga keekonomian dengan warna ungu. Langkah ini akan diikuti daerah lainnya di DIY, setelah program konversi minyak tanah ke gas elpiji selesai dilakukan.

Demikian diungkapkan Sales Area Manajer Pertamina Yogyakarta, Arie Anggoro kepada wartawan usai melakukan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Gedung Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, Selasa (4/11). Takipak ikut memberikan penjelasan, Pemimpin BI Yogyakarta, Tjahjo Oetomo dan sejumlah instansi terkait.

Menurut Arie, sebelumnya, penghentian distribusi minyak tanah bersubsidi ini dilakukan pada Agustus lalu. Namun demikian, karena pertimbangan kondisi waktu itu, dimana mendekati Lebaran, maka penghentian ditunda. "Jadi tanggal 10 November ini sudah final," ujarnya.

Ditambahkan, beberapa daerah di Jawa Tengah sebelumnya sudah dilakukan penghentian distribusi minyak tanah bersubsidi, seperti Kota Semarang dan Kabupaten Semarang serta Salatiga. Sedangkan untuk DIY, pelaksanaannya mengalami kemunduran.

Penghentian ini dilakukan karena program konversi minyak tanah ke gas elpiji di Kota dan Sleman sudah selesai. Untuk Bantul dan Gunungkidul, program konversi masih berjalan. Sedangkan untuk Kulonprogo, masih dalam tahap pencacahan dan belum pada pembagian kompor gas dan tabung.

Bagi masyarakat yang ingin menggunakan minyak tanah, dapat membeli minyak

tanah non subsidi dengan harga keekonomian. Penyaluran dilakukan di pangkalan minyak tanah melalui 2 agen yang ditunjuk, yakni PT Mita Sakti Mulya dan PT Amita Jaya Manunggal.

Sedangkan harga tebusnya pada 1 November lalu Rp 7.132 per liter. Untuk harga agen dan pangkalan akan mengikuti mekanisme pasar, karena minyak tanah tersebut bukan barang bersubsidi. Sehingga agen dan pangkalan akan menambahkan komponen biaya distribusi dan margin.

Public Relation PT Pertamina Semarang, Heppy Wulansari menambahkan, distribusi minyak tanah non subsidi akan dilakukan setelah pasokan yang ada di pangkalan sudah habis. Bisa saja, distribusi dilakukan oleh agen yang ditunjuk setelah tanggal 10 November.

Dalam keterangan pers tersebut, AKBP Drs Darmanto dari KST OPS II Direktorat Intel Polda DIY mengemukakan, pihaknya akan ikut mengawasi distribusi minyak tanah bersubsidi yang masih dilakukan di tiga kabupaten. Pengawasan dilakukan melalui Polsek-Polsek. Harapannya, jangan sampai ada perlintasan distribusi minyak tanah bersubsidi di luar wilayah yang ditentukan.

Sedangkan Tjahjo Oetomo mengemukakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY mendesak agar distribusi tabung gas 3 kg dapat dipercepat. Dalam pelaksanaannya, aparat keamanan diminta dapat mengawasi proses konversi dan menindak secara tegas bagi pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan yang akan merugikan rakyat.

(Jon/Rsv)-f

Walik
Wakil
Sekret
Asiste
INSTA
.....
.....

Positif Segera Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005